

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jepang menganut sistem politik *trias politica* yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga yaitu; (1) eksekutif yang diduduki oleh kabinet, (2) legislatif yang diduduki oleh Diet dan (3) yudikatif yang diduduki oleh Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Umumnya dalam konsep *trias politica*, pembuatan kebijakan terlihat pada dinamika hubungan legislatif dan eksekutif namun selama beberapa dekade, aktor utama proses pembuatan kebijakan Jepang disebut dengan *iron triangle* yang terdiri dari politisi, birokrat dan bisnis-bisnis besar. Untuk waktu yang lama, sumber utama kekuasaan Jepang lebih terletak pada birokrasi daripada institusi demokrasi/diet.<sup>2</sup>

Pasca perang dunia II, tren *iron triangle* mulai berubah. Skandal politik dan *economic bubble* yang terjadi pada tahun 1990 membuat publik tidak mempercayai pemerintah. Kecurigaan publik menyebabkan peningkatan partisipasi sipil dalam proses politik.<sup>3</sup> Secara bertahap, aktor-aktor di luar *iron triangle* seperti kelompok-kelompok berpengaruh, organisasi non-profit, NGO, opini publik dan media berita

---

<sup>1</sup> Edwin O. Reischauer dan Marius B. Jansen, *The Japanese Today: Change and Continuity* (Berkeley Books, pte. Ltd.)

<sup>2</sup> Glenn D. Hook et al., *Japan's International Relations: Politics Economics and Security* (New York: Routledge, 2005)

<sup>3</sup> V. Pollard, *Globalization, democratization and Asian leadership. Power sharing, foreign policy, and society in the Philippines* (Aldershot: Ashgate, 2004)

semakin tinggi keterlibatannya dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>4</sup> Namun, para menteri dan elit-elit politik masih memiliki kekuasaan yang besar terhadap seluruh aspek di dalam yurisdiksi mereka.<sup>5</sup> Para eksekutif kebijakan luar negeri (Sekretaris Kabinet, Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri) telah belajar ‘mengelola’ aktivitas aktor-aktor non negara.<sup>6</sup>

Kebijakan luar negeri Jepang dalam mewujudkan tujuan politik luar negerinya selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pada era Shinzo Abe, fokus kebijakan luar negeri Jepang adalah; memperkuat aliansi Jepang – Amerika Serikat, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga dan memperkuat diplomasi ekonomi.<sup>7</sup> Ketiga fokus tersebut merupakan upaya Jepang untuk meningkatkan eksistensi Jepang dalam komunitas internasional terutama sebagai kontributor perdamaian yang proaktif dan untuk mewujudkan Jepang sebagai *peace-loving nation*.

Salah satu fokus politik luar negeri Jepang ialah meningkatkan hubungan bilateral terutama dengan negara tetangga dalam rangka mewujudkan tujuan Jepang sebagai *leading country* di Asia Timur.<sup>8</sup> Republik Korea merupakan negara tetangga yang paling signifikan bagi Jepang. Hal ini dapat dilihat dalam *Diplomatic Bluebook* 2016<sup>9</sup> pada halaman 24, Jepang menyatakan bahwa Republik Korea merupakan

---

<sup>4</sup> R. Pekkanen, *Japan's Dual Civil Society. Members without Advocates* (California: Stanford University Press, 2006)

<sup>5</sup> K. Cooney, *Japan's foreign policy since 1945* (Armonk/N.Y.: M. E. Sharpe, 2007), 92

<sup>6</sup> Pollard, 162

<sup>7</sup> Message from the Minister for Foreign Affairs on Diplomatic Bluebook, 2015.

<sup>8</sup> Tatsumi, Yuki, *Japan's Foreign Policy Challenges in East Asia* (Washington D.C: Stimson, 2014), 14

<sup>9</sup>Buku yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Jepang yang berisi catatan diplomasi Jepang dan situasi internasional tahun 2015

tetangga Jepang paling penting yang berbagi kepentingan strategis dengan Jepang. Selain itu, Republik Korea juga termasuk lima besar mitra perdagangan Jepang. Republik Korea merupakan mitra ekspor ketiga terbesar dan mitra impor terbesar keempat Jepang.<sup>10</sup> Terlepas dari kerjasama-kerjasama yang telah dibangun Jepang dengan Republik Korea, terdapat satu persoalan yang menjadi ‘hambatan besar’ dalam hubungan bilateral Jepang dengan Republik Korea yaitu persoalan *comfort women*.<sup>11</sup>

*Comfort women* adalah padanan dari Bahasa Jepang *jugun ianfu* yang berarti prostitut.<sup>12</sup> Istilah ini merujuk kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual oleh Militer Jepang di wilayah-wilayah jajahannya sebelum dan selama Perang Dunia II.<sup>13</sup> Sebagian besar *comfort women* berasal dari Korea, Tiongkok, dan Filipina, selain itu juga berasal dari Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, Timor Timur dan bahkan dari Belanda.<sup>14</sup>

Menurut Jaejung Jung, penstudi hubungan internasional di Korea, terdapat tiga fase perkembangan dalam isu *comfort women*.<sup>15</sup> Fase pertama terjadi pada tahun 1990 – 2007 yang diawali permintaan dari anggota House of Councillor Jepang kepada Pemerintah Jepang untuk menginvestigasi isu *comfort women*. Pemerintah

---

<sup>10</sup> www.globaledege.msu.edu yang diolah dari data UN Comtrade 2015 dan The World Bank

<sup>11</sup> Hayato Nakayama, “Japanese Activist who Support Redress for “ Comfort Women”: Why and How Do They Address the “Comfort Women” Issu?” (Thesis., University of Manitoba, 2013)

<sup>12</sup> Sarah C. Soh, *The Comfort women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 69

<sup>13</sup> Carmen Argibay, "Sexual Slavery and the *Comfort women* of World War II," *Berkeley Journal of International Law*, 2003

<sup>14</sup> Reiji Yoshida, "Evidence documenting sex-slave coercion revealed", *The Japan Times*. April 18, 2007 (Ditarik pada 29 Juni 2014)

<sup>15</sup> Haesel Kim, “Contending Narratives on the ‘*Comfort women*’ Issue in South Korea and Japan” (research., Colgate University, 2016)

Jepang menyangkal keterlibatannya dalam persoalan tersebut dan menolak investigasi.<sup>16</sup> Penyangkalan resmi ini menyebabkan kemarahan masyarakat Republik Korea dan diikuti rangkaian protes serta pembentukan Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (the Korean Council) oleh koalisi 37 organisasi perempuan dan kemanusiaan.<sup>17</sup> Korean Council khusus mengurus isu *comfort women*, mengungkap kejahatan-kejahatan militer Jepang dan meminta kompensasi legal dari Jepang.<sup>18</sup>

Puncak dari rangkaian protes ini ialah munculnya seorang mantan *comfort women* bernama Kim Hak Sun ke publik atas dorongan Korean Council yang menyampaikan kisah hidupnya lewat media masa pada Agustus 1991 yang dengan luar biasa menarik perhatian publik kedua negara.<sup>19</sup> Setelah itu, tiga orang mantan *comfort women* dari Republik Korea memasukkan tuntutan ke Pengadilan Distrik Tokyo pada 6 Desember 1991.<sup>20</sup>

Pada 7 Januari 1992 dilaporkan bahwa dokumen-dokumen mengenai *comfort women* telah ditemukan di National Institute for Defense Studies yang mengindikasikan keterlibatan militer Jepang dalam kasus *comfort women*.<sup>21</sup> Penerbitan dokumen ini oleh *Asahi Shimbun*, meskipun hasil studi yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Etsuro Totsuka, "Commentary On A Victory for "Comfort Women": Japan's Judicial Recognition of Military Sexual Slavery," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 8, no.1 (1999)

<sup>17</sup> Anna C. Suwardi dan Atina Rosydiana, "The Role of Media and Social Movement in Human Right Issue: The Case of 'Comfort Women' by Japan Colonization," *Indonesian Perspective* 2, no. 1 (Januari-Juni 2017)

<sup>18</sup> Cabinet Secretariat Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) Regarding the Comfort women Issue –From the Drafting of the Kono Statement to the Asian Women's Fund*, Laporan Studi., 2014., 11

<sup>19</sup> Totsuka, Op.cit., hlm 49.

<sup>20</sup> Cabinet Secretariat Ministry of Foreign Affairs of Japan, Op.cit., hlm 1.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 2.

belum diketahui, pada 11 Januari 1992 meningkatkan kritik anti-Jepang di Republik Korea.<sup>22</sup> Pada 6 Juli 1992, Sekretaris Kabinet Jepang melakukan konferensi pers untuk mengumumkan hasil studi yang dilakukan sejak Desember 1991. Hasil studi sekaligus permintaan maaf dari pemerintah Jepang tersebut dinyatakan sebagai berikut;

pemerintah terlibat dalam pembentukan *comfort stations*<sup>23</sup>, termasuk pengendalian perekrutan *comfort women*, pembangunan dan penjagaan fasilitas, manajemen dan pengawasan, perawatan kebersihan serta masalah identifikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan *comfort stations*. Jepang kembali menyatakan permintaan maaf dan penyesalan sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang mengalami penderitaan yang tidak tergambarkan yang dikenal dengan *comfort women*.<sup>24</sup>

Kono Statement (pernyataan Yohei Kono, Menteri Kabinet Jepang) juga dikeluarkan pada fase pertama ini, tepatnya tahun 1993, diikuti dengan deklarasi Perdana Menteri Murayama, menyatakan bahwa “Militer Jepang masa perang, secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan dan pengaturan *comfort stations*, dan perekrutan *comfort women* dilakukan umumnya oleh perekrut swasta yang merespon permintaan militer.”<sup>25</sup> Pernyataan ini kemudian menjadi kontroversial dan sasaran kritik bagi pihak-pihak konservatif Jepang.

Kono Statement menjadi faktor terbentuknya Asian Women Fund (AWF) pada 1995. AWF oleh Jepang yang dimaksudkan sebagai kompensasi bagi *comfort women*, gagal mendapat dukungan dari Korean Council dan dibubarkan pada tahun 2007. Mayoritas *comfort women* dan kelompok pendukung menolak AWF karena tidak mengakui keterlibatan pemerintah Jepang, menggunakan donasi dari publik

---

<sup>22</sup> Loc.cit.

<sup>23</sup> Rumah bordil khusus militer Jepang pada masa perang

<sup>24</sup> Cabinet Secretariat Ministry of Foreign Affairs of Japan, Op.cit., hlm 4.

<sup>25</sup> James Sterngold, "Japan Admits Army Forced Women Into War Brothels", *The New York Times*. Agustus 5, 1993 (Ditarik pada 26 Februari 2014)

bukan dari pemerintah dan tidak menyebut dana itu sebagai kompensasi resmi melainkan sebagai ‘dana bantuan’.<sup>26</sup>

Fase kedua berlangsung pada tahun 2011 – 2012<sup>27</sup> sejak Mahkamah Konstitusi Republik Korea memutuskan bahwa kelambanan Pemerintah Republik Korea dalam menyelesaikan persoalan *comfort women* dan mengabaikan para korbannya sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Keputusan itu diikuti oleh tekanan-tekanan yang dilakukan para korban dan pendukung dalam mendesak Presiden Lee Myung Bak untuk mengangkat persoalan ini dan mendiskusikan upaya penyelesaiannya dengan Perdana Menteri Yoshihiko Noda.

Rancangan untuk kesepakatan baru ini telah disetujui oleh Presiden Lee namun ditolak oleh Perdana Menteri Noda. Kesepakatan ini tidak pernah ditandatangani karena konflik yang terjadi antara pemerintah nasional kedua negara dan isu ini kemudian ditarik mundur dari agenda pembahasan keduanya. Berangkat dari kegagalan-kegagalan yang dialami dalam penyelesaiannya, kedua negara sama-sama menghindari pembahasan mengenai hal ini yang mana menimbulkan kemarahan dari pihak korban dan kelompok pendukung. Isu *comfort women* pada fase ini kemudian menjadi hal yang dihindari oleh kedua belah pihak pemerintah yang menyebabkan sulitnya upaya-upaya penyelesaiannya.

Fase ketiga berlangsung dari tahun 2013 ketika kedua negara berganti kepemimpinan hingga tahun 2015 ketika Agreement 28 December 2015 tercapai. Pada Februari 2013, Park Geun Hye menjadi presiden Republik Korea dan

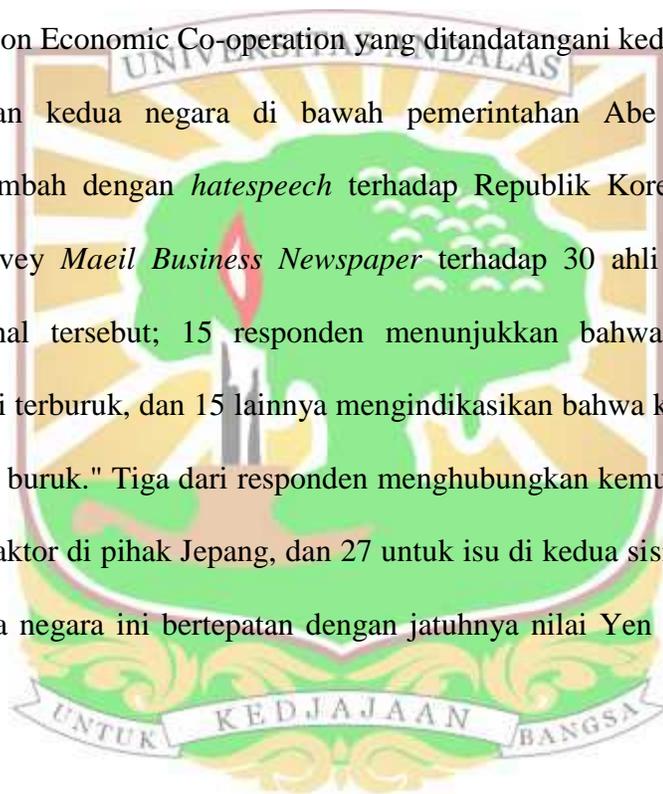
---

<sup>26</sup> Haesel Kim, Op.Cit.,

<sup>27</sup> ibid

menjadikan *comfort women* sebagai prioritas utama dalam hubungan luar negerinya dengan Jepang.<sup>28</sup> Presiden Park secara berkelanjutan menolak untuk melakukan *summit* dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai respon atas sikap Abe yang dianggap negatif terhadap isu *comfort women* dengan beberapa kali berencana melakukan revisi Kono Statement<sup>29</sup> <sup>30</sup> dan mengatakan bahwa persoalan itu sudah selesai dalam 1965 Agreement on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims and on Economic Co-operation yang ditandatangani kedua negara.<sup>31</sup>

Hubungan kedua negara di bawah pemerintahan Abe dan Park terus memburuk ditambah dengan *hatespeech* terhadap Republik Korea di Jepang dan sebaliknya. Survey *Maeil Business Newspaper* terhadap 30 ahli di kedua negara membuktikan hal tersebut; 15 responden menunjukkan bahwa hubungan telah mencapai situasi terburuk, dan 15 lainnya mengindikasikan bahwa keadaan hubungan tersebut "sangat buruk." Tiga dari responden menghubungkan kemunduran hubungan dengan faktor-faktor di pihak Jepang, dan 27 untuk isu di kedua sisi.<sup>32</sup> Memburuknya hubungan kedua negara ini bertepatan dengan jatuhnya nilai Yen dan naiknya nilai



---

<sup>28</sup> Yangmo Ku, "What is it for? Assessing the South Korea-Japan Deal on the *Comfort women* Issue," *E-International Relations* (Februari 18 2016), <http://www.e-ir.info/2016/02/18/what-is-it-for-assessing-the-south-korea-japan-deal-on-the-comfort-women-issue/> (diakses Oktober 24 2017)

<sup>29</sup> Reiji Yoshida, "'Comfort Women' issue refuses to go away. Nationalist using Asahi errors as ammo against 1993 apology," *The Japan Times*, (diakses Oktober 27 2017)

<sup>30</sup> Kazuhiko Togo, "Can South Korea and Japan resolve the 'comfort women' issue?," *East Asia Forum* (Oktober 15 2014), <http://www.eastasiaforum.org/2014/10/15/resolving-the-comfort-women-issue-between-south-korea-and-japan/> (diakses Januari 28 2018)

<sup>31</sup> Naoko Kumagai, "The Background to the Japan-Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue," *Asia-Pacific Review* 23, No. 1 (2016), hal. 66

<sup>32</sup> Survey dilaksanakan pada November 2013

Won, sehingga meningkatkan kritik masyarakat Jepang terhadap pemerintah atas ketidakmampuan penyelesaian isu ini.<sup>33</sup>

Kejadian signifikan yang terjadi pada fase ini salah satunya pengakuan *Asahi Shimbun* pada Agustus 2014 atas *misreporting* atau kesalahan pemberitaan yang dilakukannya pada berita-berita mengenai *comfort women*.<sup>34</sup> Selain menyatakan permintaan maaf atas *misreporting* tersebut, *Asahi Shimbun* juga menarik artikel-artikel dan berita-beritanya mengenai *comfort women*.<sup>35</sup> Pengakuan ini membuat isu *comfort women* kembali menjadi pemberitaan utama di media-media Jepang, Republik Korea dan internasional.

Sejak tahun 2014, kedua negara telah melakukan negosiasi sebanyak 12 kali terkait isu ini dan di setiap akhir pertemuan, media melaporkan bahwa pandangan kedua negara terhadap isu ini selalu memiliki perbedaan signifikan. Republik Korea menjadikan isu ini sebagai pembahasan utama dengan Jepang dan menuntut upaya penyelesaian sesegera mungkin setelah naiknya Presiden Park, namun Jepang tidak menjadikannya prioritas dan menolak untuk mengambil tindakan. Meskipun diberitakan bahwa kedua negara akan kembali bertemu pada 28 Desember 2015, tidak ada gambaran bahwa akan tercapai kesepakatan pada pertemuan itu.<sup>36</sup>

Pembicaraan mengenai isu ini kembali dimulai kedua negara pada 31 Oktober hingga 2 November 2015 saat *Trilateral Summit Meeting* antara Republik Korea,

---

<sup>33</sup> Hidehiko Mukoyama, "The Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations –What Should Japan and South Korea Do Now?-", *RIM Pacific Business and Industries* 14, No. 51 (2014)

<sup>34</sup> Tsutomu Nishioka, *The Comfort women Issue in Sharper Focus* (Tokyo: Japan Policy Institute, 2015)

<sup>35</sup> Loc.cit.

<sup>36</sup> Loc.cit.

Jepang dan Tiongkok. Hasilnya, kedua pihak menyadari bahwa isu *comfort women* berdampak pada perkembangan hubungan Jepang-Republik Korea dan bersepakat bahwa isu ini tidak boleh mempengaruhi generasi selanjutnya hingga harus diselesaikan secepat mungkin. Kedua pemimpin negara menginstruksikan agar konsultasi antar Direktur Jendral dan konsultasi tingkat lainnya mengenai *comfort women* yang tengah berlangsung segera dipercepat mengingat 50 tahun peringatan normalisasi hubungan kedua negara yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2015<sup>37</sup>.

Hasil kesepakatan kedua negara yang dikenal secara luas dengan nama 'Agreement 28 December 2015' disampaikan oleh kedua Menteri Luar Negeri.<sup>38</sup> Fumio Kishida menyatakan atas nama Pemerintah Jepang; (1) permintaan maaf dari Negara Jepang, (2) kesepakatan pendirian yayasan oleh Republik Korea yang bertujuan untuk menyokong kehidupan *comfort women* dengan pembiayaan penuh oleh Pemerintah Jepang yang bersifat satu kali kontribusi, dan (3) kesepakatan ini merupakan penyelesaian isu *comfort women* yang final dan tidak dapat diganggu gugat dengan komitmen bahwa kedua negara mengimplementasikan poin 2 sepenuhnya. Sebagai tambahan, bersama dengan Republik Korea, Pemerintah Jepang akan menahan diri untuk saling kritik mengenai isu ini di forum-forum internasional termasuk PBB.

Yun Byun-se menyatakan atas nama Pemerintah Republik Korea; (4) Republik Korea menghargai upaya penyelesaian yang dibuat oleh Jepang dan

---

<sup>37</sup> Roh Daniel, "Surprise Agreement on Comfort Women Issue and the Blowback in South Korea," *nippon.com* (Februari 5, 2016) <https://www.nippon.com/en/column/g00340/> (diakses Mei 7, 2017)

<sup>38</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion 28 December 2015*

menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan penyelesaian final dan tidak dapat diganggu gugat dengan catatan bahwa Jepang akan mengimplementasikan poin 2 sepenuhnya. Republik Korea akan bekerjasama dalam implementasi tersebut, (5) Republik Korea akan berupaya menyelesaikan permasalahan peletakan patung *comfort women* di depan Kedutaan Jepang dengan cara berkonsultasi dengan organisasi terkait mengenai penyelesaiannya dan (6) Republik Korea bersama dengan Pemerintah Jepang akan menahan diri untuk saling kritik mengenai isu ini di forum-forum internasional termasuk PBB dengan catatan bahwa Jepang akan mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat dengan sepenuhnya.

Agreement 28 December 2015 menjadi menarik untuk diteliti karena sangat bertolak belakang dari sikap Pemerintah Jepang terhadap isu tersebut selama ini, terutama sejak naiknya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang. *Agreement* ini juga dapat dikatakan sebagai langkah yang tidak terduga karena tidak adanya tanda-tanda penyelesaian sebelum *trilateral summit* bersama Tiongkok. Sehingga, penelitian mengenai perumusan kebijakan luar negeri Jepang terkait *agreement* ini dirasa penting untuk menjelaskan pernyataan-pernyataan di atas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Isu *comfort women* merupakan hambatan dalam hubungan bilateral Jepang dengan Republik Korea. Sejak kemunculannya pada tahun 1992, isu ini tidak pernah terselesaikan secara final oleh kedua negara. Jepang sebagai negara yang dituntut pertanggung jawabannya oleh Republik Korea atas persoalan *comfort women* ini, telah melakukan beberapa upaya sejak tahun 1992 hingga berakhir pada tahun 2007.

Sejak itu, Jepang dinilai tidak melakukan upaya penyelesaian meski sudah didesak oleh Republik Korea, hingga pada tahun 2015 munculnya *Agreement 28 December 2015*. Kebijakan luar negeri Jepang ini memiliki perbedaan signifikan dengan sikap Jepang terhadap isu *comfort women* selama beberapa pemerintahan terakhir. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Republik Korea terkait *Agreement 28 December 2015* mengenai isu *comfort women*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Republik Korea terkait *Agreement 28 December 2015* mengenai isu *comfort women*

### 1.5 Manfaat Penelitian

- ) Memperkaya pengetahuan peneliti dalam memahami determinan-determinan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Republik Korea terkait isu *comfort women*
- ) Menambah referensi dan kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kajian kebijakan luar negeri

## 1.6 Studi Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik dan tema serupa dengan judul penelitian ini ataupun yang mampu memberikan kontribusi pada penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi studi pustaka peneliti dan berfungsi sebagai acuan untuk melakukan analisa lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang hendak diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil lima studi pustaka yang telah disimpulkan sebagai berikut:

Studi pustaka pertama berjudul *The Comfort women Issue in Sharper Focus* oleh Tsutomu Nishioka yang diterbitkan oleh Japan Policy Institute pada tahun 2015.<sup>39</sup> Dalam buku ini, Nishioka menjelaskan secara detail 3 hal mengenai isu *comfort women* yaitu *misreporting* yang dilakukan oleh *Asahi Shimbun*, alasan munculnya persoalan ini menjadi konflik antara kedua negara pada tahun 1992 dan bagaimana sebenarnya kehidupan *comfort women*. Nishioka menyatakan bahwa *misreporting* yang dilakukan *Asahi Shimbun* merupakan penyebab utama terjadinya miskonsepsi mengenai isu ini hingga menjadikannya konflik berkepanjangan antara Jepang dan Republik Korea. Selain itu, terdapat juga 2 faktor lain yaitu agitasi yang dilakukan oleh aktivis Jepang dan kecerobohan diplomasi Jepang yang ditandai dengan permintaan maaf yang berulang kali dilontarkan tanpa melakukan pengecekan fakta.

---

<sup>39</sup> Tsutomu Nishioka, *The Comfort women Issue in Sharper Focus* (Tokyo: Japan Policy Institute, 2015)

Buku Nishioka ini membantu peneliti memahami kemunculan dan perkembangan isu *comfort women* dan alasan mengapa isu ini menjadi persoalan bilateral. Buku ini memberikan data berupa *timeline* perkembangan isu *comfort women* dari sudut pandang media dan data primer mengenai keadaan *comfort station* yang didapat dari wawancara dengan pihak yang memberikan perizinan kerja pada *comfort women*.

Studi pustaka selanjutnya, *Unresolved Comfort women Issue: How Pragmatism Precludes Reconciliation* oleh Patrick Hein dalam *The Korean Journal of International Studies* Vol.14, No.3<sup>40</sup> menyatakan bahwa sikap pragmatisme lah yang menyebabkan mandegnya proses rekonsiliasi persoalan *comfort women*. Sikap pragmatisme yang dimaksud ialah upaya pencapaian rekonsiliasi semata-mata hanya untuk menjaga hubungan diplomatik bukan berdasarkan kesadaran akan nilai-nilai HAM. Menurut Hein, salah satu bentuk nyata pragmatisme Abe yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan dengan Republik Korea saja. Hal ini dikarenakan hubungan bilateral dengan Republik Korea dianggap krusial dalam mempertahankan stabilitas keamanan Jepang.

Dalam tulisannya, Hein juga menyertakan beberapa hasil survey, yang terpenting di antaranya yaitu survey oleh Genron yang menanyakan apakah kendala terbesar dalam hubungan Republik Korea dan Jepang. Dalam survey tersebut, 63% masyarakat Republik Korea dan 58% masyarakat Jepang menjawab persoalan '*comfort women*'. Jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi peneliti berupa data

---

<sup>40</sup> Patrick Hein, "Unresolved *Comfort women* Issue: How Pragmatism Precludes Reconciliation," *The Korean Journal of International Studies* 14, no. 3 (Desember 2016): 447-460

hasil jajak pendapat publik di Jepang dan Republik Korea mengenai isu *comfort women* yang dilakukan oleh NPO Genron, *Sankei Newspaper* dan Gallup Korea.

*Contending Narratives on the 'Comfort women' Issue in South Korea and Japan* oleh *Haesel Kim* yang diterbitkan oleh Lampert Institute for Civic and Global Affairs, Colgate University<sup>41</sup> menjadi studi pustaka ketiga. Penelitian ini membahas perbedaan narasi isu '*comfort women*'; mengapa perbedaan narasi itu bisa muncul dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Dua narasi besar yang dibahas yaitu nasionalisme dan feminisme di kedua negara. Narasi *Historical Responsibility* dalam nasionalisme Jepang mendorong pemerintah untuk menyadari kesalahan masa lalu dan bertanggung jawab terhadap itu. Satu pencapaian signifikan dari narasi ini terkait isu *comfort women* yaitu terbentuknya Kono Statment. Kelompok yang sangat menentang pertanggungjawaban isu *comfort women* harus dilakukan oleh Jepang adalah *historical revisionist* dan *net right* yang mendukung penerbitan buku-buku pelajaran sejarah yang menampilkan sisi positif Jepang saja.

Di Republik Korea, narasi yang mendominasi ialah *resistance nationalism* dan *feminism* dimana keduanya sama-sama berada di pihak korban *comfort women*. The Korean Council dan *The Wednesday Demonstration* merupakan bentuk konkret dari tindakan feminis Republik Korea yang selalu memberi tekanan pada kedua pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Jurnal ini membantu peneliti dalam memahami perbedaan sikap dan gagasan mengenai isu *comfort women*, baik itu

---

<sup>41</sup> Haesel Kim, "Contending Narratives on the 'Comfort women' Issue in South Korea and Japan" (Research paper, Colgate University, 2016)

perbedaan antara kedua negara maupun perbedaan yang terjadi antara berbagai kelompok di Jepang maupun Republik Korea.

Studi pustaka keempat berjudul *The Relationships between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis* oleh Matthew A. Baum dan Philip B.K. Potter terbitan *Annual Review Political Science*.<sup>42</sup> Jurnal ini membahas kebijakan luar negeri dalam kerangka *market equilibrium*, sehingga arena pembuatan dan pengaruh KLN disebut sebagai pasar, dan para aktor berperan sebagai pelaku pasar. Pasar KLN dikendalikan oleh distribusi komoditi utama di antara ketiga aktor (pemimpin, publik dan media masa) yaitu informasi. Media sebagai ‘pedagang’ informasi, bergantung pada pemerintah (produsen) dalam mendapatkan sumber info (*supply*) dan menjaga keberlangsungannya dengan terus mendistribusikan info (*demand*) pada publik (konsumen).

Dari aktor utama dalam pasar KLN, 2 diantaranya (pemimpin dan publik) cenderung membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan preferensinya yang mana hal itu seringkali berbeda. Ketika perbedaan itu terjadi, yang menentukan ‘pemenangnya’ adalah siapa yang lebih mampu mempengaruhi kebijakan dengan jumlah informasi yang dimiliki melalui media.

Studi pustaka terakhir berjudul *Japan’s Foreign Policy and East Asian Regionalism* yang ditulis oleh Hitoshi Tanaka dan Adam P. Liff yang dimuat dalam

---

<sup>42</sup> Matthew A. Baum dan Philip B.K. Potter, “The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis,” *Annual Review Political Science* 11 (2008): 39-65

*Council on Foreign Relations*.<sup>43</sup> Jurnal ini membahas kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia Timur dan kontribusi Jepang terhadap proses regionalisasinya. Tiga prinsip yang menjadi pokok kebijakan Jepang terhadap Asia Timur adalah: (1) Jepang tidak akan pernah menjadi kekuatan militer dan akan bekerja untuk menjunjung perdamaian dan kesejahteraan kawasan; (2) Jepang akan membangun hubungan dengan negara di kawasan berlandaskan saling percaya; dan (3) Jepang akan bekerja secara kooperatif melalui kemitraan yang setara untuk memperkuat solidaritas kawasan. Tanaka dan Liff juga menyatakan bahwa peran Jepang di kawasan tidak akan bisa dibicarakan tanpa menyebut aliansi Jepang dan Amerika Serikat yang merepresentasikan komponen penting kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Timur. Upaya dominasi Jepang di kawasan seringkali terganggu dengan persoalan sejarah yang terjadi antara Jepang dengan negara-negara Asia Timur.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Teori Kebijakan Luar Negeri**

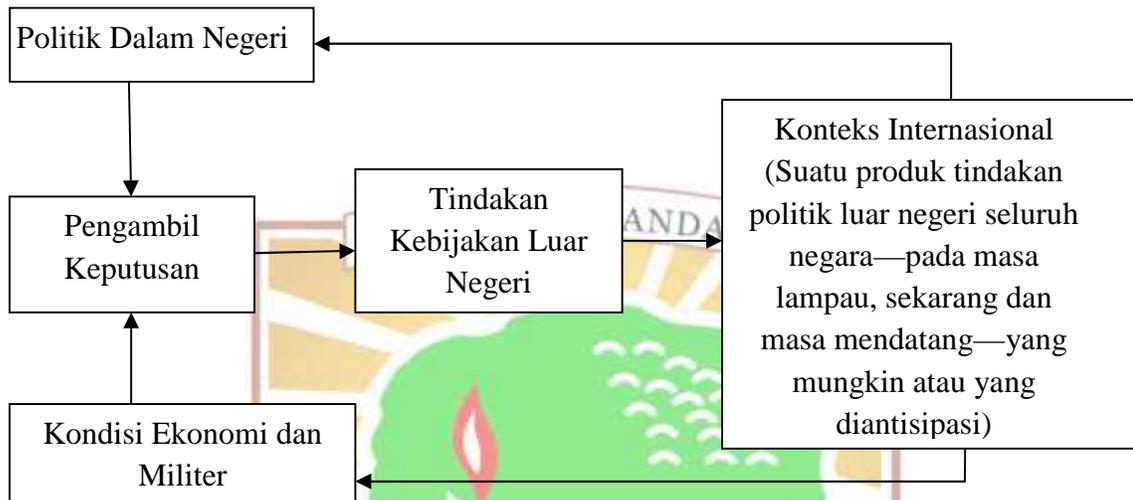
Penelitian ini menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Menurutnya, tindakan negara yang terwujud dalam sebuah kebijakan luar negeri merupakan akibat dari tiga determinan yang mempengaruhi pembuat kebijakan; (1) kondisi politik dalam negeri, (2) kondisi ekonomi dan militer, dan (3) konteks internasional. Interaksi faktor-faktor tersebut

---

<sup>43</sup> Hitoshi Tanaka dan Adam P. Liff, "Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism" *Council on Foreign Relations* (Desember 2009)

dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri diilustrasikan oleh William D. Coplin sebagai berikut:<sup>44</sup>

**Skema 1.1 Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin**



Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, CV Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 30

Faktor-faktor di atas dijabarkan Coplin sebagai berikut:

### 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menentukan bagaimana cara kerja kebijakan luar negeri sebuah negara, dapat diamati dari situasi domestiknya.<sup>45</sup> Dalam kaitannya dengan analisis kebijakan luar negeri, Coplin memfokuskan pada hubungan antara para pengambil keputusan kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Aktor-aktor politik

<sup>44</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 30

<sup>45</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)

itu disebut dengan *policy influencers* (yang mempengaruhi kebijakan). Terdapat 4 (empat) kategori *policy influencers*; *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*.<sup>46</sup>

*Bureaucratic influencers* yaitu berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kelompok birokratis sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dikarenakan para pembuat kebijakan bergantung kepada mereka dalam hal informasi-informasi penting serta dalam bantuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut nantinya. Selain itu, *bureaucratic influencers* juga terkadang merupakan anggota kelompok pengambil keputusan, sehingga sukar menggambarkan garis pemisah yang jelas antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dengan yang bertindak sebagai pengambil keputusan.<sup>47</sup>

Anggota kelompok *influencer* ini juga bisa mempengaruhi pengambil keputusan secara pribadi, atau bahkan menggunakan taktik mempengaruhi kebijakan yang lebih kuat yaitu dengan membocorkan informasi kepada pers agar muncul oposisi politik terhadap suatu isu. Kelompok ini bisa beroperasi dengan efektif pada bidang-bidang di mana kebijakan belum diformulasikan dan berlaku sebaliknya untuk kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan lama.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Coplin, Op.cit., 1987, hlm 74

<sup>47</sup> Ibid, hlm 82

<sup>48</sup> Ibid, hlm 83

*Partisan influencers* adalah partai-partai politik yang bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Kelompok ini mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.<sup>49</sup> *Partisan influencer* memainkan peran terbatas dalam menyetujui atau menolak tindakan-tindakan KLN yang diprakarsai oleh para pembuat keputusan. Keterbatasan ini disebabkan kecenderungan mereka untuk lebih memperhatikan politik dalam negeri ketimbang luar negeri. Namun, dalam jangka panjang mereka dapat berperan dalam mengubah sikap-sikap dasar masyarakat melalui perdebatan umum.<sup>50</sup>

*Interest influencer* merupakan sekelompok orang yang bergabung bersama berlandaskan kepentingan yang sama, memiliki landasan aktivitas yang berbeda dengan partai politik namun sangat dibutuhkan sebagai sumber dukungan, baik bagi *policy influencer* lainnya ataupun bagi pembuat kebijakan.<sup>51</sup> Kelompok ini berkembang pesat seiring perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat karena cenderung muncul dengan aksi protes dan menggalang dukungan dari masyarakat umum. Selain itu, *interest influencer* bekerja dengan cara menekan *policy influencers* lain atau langsung menekan para pengambil keputusan.

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 84

<sup>50</sup> Ibid, hlm 86

<sup>51</sup> Ibid, hlm 87

*Mass influencer* mengacu pada iklim opini yang dimiliki oleh masyarakat yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun KLN.<sup>52</sup> Dalam negara demokrasi, iklim opini lebih terbebas dari manipulasi langsung para pengambil keputusan sehingga kelompok ini mampu memperoleh informasi yang sering menjadi dasar ketidaksepakatan terhadap para pengambil keputusan. Menurut Katz dan Lazarsfeld, media masa bukanlah satu-satunya yang berperan dalam pembentukan opini, bagaimana pemimpin atau tokoh masyarakat membahas sebuah isu juga turut berperan.<sup>53</sup> Para pengambil keputusan memformulasikan kebijakan-kebijakan dengan memperhitungkan efeknya terhadap opini publik sebagai salah satu upaya melanggengkan kekuasaannya.

## 2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer sebuah negara merupakan dua variabel yang dapat menjadi pengaruh/penentu (determinan) dalam pengambilan keputusan KLN. Kedua variabel ini saling berkaitan secara paralel; ketika kekuatan ekonomi meningkat, maka kapasitas militer juga mengalami peningkatan. Menurut Coplin, dimensi dalam mengukur kemampuan dan kondisi ekonomi sebuah negara adalah; (1) kapasitas produksi barang dan jasa dan (2) kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional, yang terwujud dalam tingkat *Gross National Product* (GNP),

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 88

<sup>53</sup> Ibid, hlm 89

*Gross Domestic Product* (GDP) dan keuangan negara.<sup>54</sup> Selain itu, peneliti juga akan membahas kerja sama ekonomi sebagai bagian dari kondisi ekonomi.

Dalam menganalisis pengaruh kondisi militer dalam proses pembuatan KLN, Coplin mengemukakan tiga dimensi yang dapat diukur; (1) kapasitas penggunaan kekuatan militer, (2) tingkat kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri dan (3) ketakstabilan internal dan kemampuan militer. Kekuatan militer dapat diukur dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan serta perlengkapan militer yang dimiliki negara tersebut.<sup>55</sup>

### 3. Konteks Internasional

Konteks internasional adalah produk tindakan politik luar negeri seluruh Negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Dalam menganalisis pengaruh konteks internasional dalam proses pembuatan KLN, terdapat tiga elemen penting menurut Coplin; geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.<sup>56</sup>

Proksimitas atau kedekatan geografis, menurut Russet, berhubungan dengan perdagangan internasional dan keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antarpemerintah sehingga menjadikan beberapa kondisi geografis sebagai bagian yang konstan dalam keputusan-keputusan luar negeri. Hubungan ekonomi dan politik

---

<sup>54</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 112

<sup>55</sup> Coplin, *Op.cit.*, 1987, hlm 124

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 167

juga bagian penting dalam konteks internasional. Aliansi-aliansi, baik bersifat ekonomi, politik maupun keamanan, berdampak besar pada anggota-anggotanya ataupun pada negara yang bukan anggota. Selain itu, kemampuan untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain dalam keadaan tertentu bisa mempengaruhi keputusan negara.<sup>57</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>58</sup> Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang akan menghasilkan data deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kondisi adanya<sup>59</sup> agar dapat menggambarkan dan menyampaikan secara lengkap dan cermat masalah yang diteliti.

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Republik Korea terkait *Agreement 28 December 2015* mengenai isu *comfort women*. Batasan waktu yang digunakan yaitu dari tahun 2013 hingga 2015. Batasan waktu ini dipilih karena 2013 merupakan awal perkembangan baru pada isu *comfort women* yang

---

<sup>57</sup> Loc.cit.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

<sup>59</sup> John W. Best, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, disunting oleh Drs. Mulyadi Guntur Waseso dan Drs. Sanafiah Faisal, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 82

ditandai dengan bergantinya pemerintahan kedua negara dan tahun 2015 merupakan tahun terbentuknya Agreement 28 December 2015.

### 1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Untuk menentukan tingkat analisis, peneliti perlu menentukan unit analisis dan unit eksplanasi terlebih dahulu. Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lainnya. Unit eksplanasi yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan diteliti.<sup>60</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah Jepang dengan unit eksplanasi yaitu isu *comfort women*. Tingkat analisis penelitian ini adalah negara.

### 1.8.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data dari studi dokumen, literatur, sejarah dan teks.<sup>61</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) di mana kegiatan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan data-data yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian, kemudian setelah data terkumpul, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data menggunakan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>60</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, pg. 110

<sup>61</sup> Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research* (London: Free Press, 1987), 39

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari; terbitan-terbitan dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Jepang (www.mofa.go.jp), data hasil jajak pendapat yang dilakukan baik oleh pemerintah kedua negara maupun pihak swasta, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan penelitian, situs, maupun surat kabar.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, data-data yang telah terkumpul akan disortir, dikelompokkan dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan sumber yang relevan bagi kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian ini.

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Proses Analisis Data dan Sumber Data**

Variabel	Analisis Data	Sumber Data
Politik dalam negeri	Pengaruh politik domestik dalam proses pembuatan kebijakan Agreement 28 December 2015 oleh	Informasi-informasi resmi dari pemerintah Jepang terkait isu

<sup>62</sup> Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (California: Sage Publications Inc, 1999), 150

<p>-Bureaucratic influencer</p> <p>-Partisan influencer</p> <p>-Interest influencer</p> <p>-Mass influencer</p>	<p>Jepang terhadap Republik Korea.</p> <p>1. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat sebagai <i>influencer</i> beserta kepentingan dan perannya dalam pembuatan kebijakan Agreement 28 December 2015 oleh Jepang</p>	<p><i>comfort women</i> yang diakses di <a href="http://www.mofa.go.jp">www.mofa.go.jp</a>, data hasil jajak pendapat yang dilakukan baik oleh pemerintah kedua negara maupun pihak swasta, buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu <i>comfort women</i> dan proses pembuatan kebijakan luar negeri di Jepang</p>
<p>Kondisi ekonomi dan militer</p>	<p>Pengaruh kondisi ekonomi dan militer Jepang dalam proses pembuatan kebijakan Agreement 28 December 2015 oleh Jepang terhadap Republik Korea.</p> <p>1. Kondisi ekonomi Jepang yang mempengaruhi pembuatan</p>	<p>Informasi resmi dari Pemerintah Jepang yang didapat melalui <i>website</i>, situs kredibel yang menyajikan data-data berkaitan dengan kondisi ekonomi serta militer, dan jurnal-</p>

	kebijakan tersebut di atas 2. Kondisi militer Jepang yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut di atas	jurnal ilmiah terkait
Konteks internasional	Pengaruh konteks internasional dalam proses pembuatan kebijakan Agreement 28 December 2015 oleh Jepang terhadap Republik Korea.	Pemberitaan media masa, buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah terkait.

### 1.9 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISU *COMFORT WOMEN***

Bab ini menjelaskan tentang sejarah kemunculan *comfort women* pada masa Perang Dunia II dan tahap-tahap perkembangan isu ini dari tahun awal kemunculan isu ini kembali pada tahun 1990, hingga tahun 2012, tepat sebelum periode perkembangan baru dimulai.

### **BAB III DINAMIKA ISU *COMFORT WOMEN* ANTARA JEPANG DAN REPUBLIK KOREA TAHUN 2013-2015**

Bab ini menjelaskan dinamika isu *comfort women* dari tahun 2013 ketika kedua negara berganti kepemimpinan hingga tahun 2015 ketika Agreement 28 December 2015 tercapai.

### **BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP REPUBLIK KOREA DALAM PEMBUATAN AGREEMENT 28 DECEMBER 2015**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang terhadap Republik Korea dalam pembuatan Agreement 28 December 2015 menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian serta berisi saran untuk penelitian-penelitian terkait selanjutnya.

